



# JURNAL BASICEDU

Volume 6 Nomor 3 Tahun 2022 Halaman 5138 - 5145

Research & Learning in Elementary Education

<https://jbasic.org/index.php/basicedu>



## Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan untuk Meyiapkan Pendidik pada Jenjang Sekolah Dasar

Yogi Nugraha<sup>1✉</sup>, Sapriya<sup>2</sup>, Endang Danial<sup>3</sup>, Rahmat<sup>4</sup>

Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia<sup>1</sup>,

Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia<sup>2,3,4</sup>

E-mail: [yogi.nugraha@ubpkarawang.ac.id](mailto:yogi.nugraha@ubpkarawang.ac.id)<sup>1</sup>, [sapriya@upi.edu](mailto:sapriya@upi.edu)<sup>2</sup>, [endangdanial@upi.edu](mailto:endangdanial@upi.edu)<sup>3</sup>, [rahmat@upi.edu](mailto:rahmat@upi.edu)<sup>4</sup>

### Abstrak

Dunia dihadapkan pada globalisasi yang mengharuskan setiap manusia harus siap dengan berbagai kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan perlu mendapat perhatian terutama sejak proses digitalisasi mulai masuk ke dunia pendidikan. Akan tetapi memang didalam perkembangan zaman tuntutan dalam pengembangan kurikulum harus terus dilakukan. Perkembangan zaman yang dimaksudkan adalah perkembangan revolusi industri 4.0 yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital. Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui kurikulum pendidikan kewarganegaraan berbasis digital untuk menyiapkan pendidik sekolah dasar di Indonesia menghadapi era revolusi industri 4.0. Penguatan kajian kajian tersebut dilakukan menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka digunakan untuk memahami secara mendalam dan komprehensif tentang kurikulum pendidikan kewarganegaraan di era revolusi industri 4.0, kemudian untuk memperkuat kajian pengembangan ini, peneliti juga melakukan kajian melalui media observasi, serta observasi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan kewarganegaraan seharusnya lebih diarahkan pada pengetahuan-pengetahuan terkait dengan multikulturalisme seperti yang sudah dilakukan di negara-negara maju. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan perlu untuk memperbaharui sistem pembelajaran serta model pembelajaran mengikuti perkembangan zaman. Pada abad ke-21 ini kebutuhan akan hasil akhir dalam sebuah pendidikan bukanlah manusia-manusia yang hanya bisa membaca, menulis dan berhitung.

**Kata Kunci:** kurikulum pendidikan kewarganegaraan, pendidik jenjang sekolah dasar.

### Abstract

World is faced with globalization which requires every human being to be prepared with various possibilities that will occur in the future. The civics education curriculum needs attention, especially since the digitalization process began to enter the world of education. However, in the development of the times, demands in curriculum development must continue to be carried out. The development of the era in question is the development of the industrial revolution 4.0 related to the use of digital technology. The purpose of this research in general is to find out the digital-based civics education curriculum to prepare elementary school educators in Indonesia to face the era of the industrial revolution 4.0. The strengthening of the study was carried out using the literature study method. Literature studies are used to understand in depth and comprehensively about the civics education curriculum in the era of the industrial revolution 4.0, then to strengthen this development study, researchers also conduct studies through observational media, as well as observation. The results obtained indicate that the civics education curriculum should be more directed at knowledge related to multiculturalism as has been done in developed countries. The civics education curriculum needs to update the learning system and learning model to keep up with the times. In the 21st century, the need for final results in education is not for humans who can only read, write and count.

**Keywords:** civics education curriculum, elementary school level educators.

Copyright (c) 2022 Yogi Nugraha, Sapriya, Endang Danial, Rahmat

✉Corresponding author :

Email : [yogi.nugraha@ubpkarawang.ac.id](mailto:yogi.nugraha@ubpkarawang.ac.id)

DOI : <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.3054>

ISSN 2580-3735 (Media Cetak)

ISSN 2580-1147 (Media Online)

## PENDAHULUAN

Seperti yang sudah kita ketahui bersama, perjalanan kemajuan dunia sudah menginjak pada masa dimana manusia tidak lagi sepenuhnya mengandalkan seluruh kemampuan fisiknya dalam menjalankan semua kegiatannya. Kemajuan zaman membuat kehidupan manusia banyak dibantu oleh alat yang mampu membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Seiring perjalanan revolusi industri 1.0 sampai dengan saat ini 4.0 sejarah kemajuan dunia terus bergerak menjadi semakin canggih dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Saat ini dunia sedang berada pada era revolusi industri 4.0 dimana penggunaan teknologi computer yang dipadukan dengan teknologi jaringan dan digitalisasi sedang banyak digunakan oleh manusia. Penggunaan teknologi juga mulai masuk pada aspek pendidikan. Era revolusi industri 4.0 sudah seharusnya dunia pendidikan mulai berbenah dan menyesuaikan kurikulum sesuai dengan arah kemajuan jaman. Hal ini mendukung pembelajaran sepanjang hayat dimana pembelajaran harus tetap berkembang menyesuaikan perkembangan zaman (Kewuel, 2016). Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan kurikulum yang juga harus menyesuaikan kurikulumnya dalam era revolusi industri 4.0 ini. Kurikulum pendidikan Pancasila menjadi bagian penting dari proses pendidikan di level pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Seperti yang diamanatkan oleh UU No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional dimana pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib yang harus dibelajarkan (UU No. 20 Tahun 2003, 2003).

Adaptasi calon pendidik terhadap penggunaan teknologi dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan harus mulai di tingkatkan. Calon pendidik merupakan garda terdepan dalam memberikan materi pelajaran kepada siswa melalui media teknologi yang saat ini sedang berkembang. Penerapan teknologi dalam dunia pendidikan sebaiknya dimulai dari tingkat sekolah dasar, karena siswa sekolah dasar yang ada saat ini secara mayoritas sudah mengenal teknologi (Rozalia, 2017). Proses pembelajaran yang berlangsung dari sejak lama diharapkan untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Proses digitalisasi sistem pembelajaran tentu tidak berlangsung secara seluruhnya tapi digitalisasi hanya mencakup medianya saja. Proses digitalisasi juga bukan berarti menggantikan peran calon pendidik sekolah dasar akan tetapi proses pembelajaran yang berlangsung di lapangan harus sudah terdigitalisasi. Peran perguruan tinggi sebagai pencetak calon pendidik sangat vital dalam membentuk karakter. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa *“University as higher education institution creating young generation of national leader has very strategic role in the process of young generation’s character building”* (Komalasari, 2012). Kurikulum pendidikan kewarganegaraan juga harus menyesuaikan kontennya dalam era revolusi industri 4.0 ini.

Beberapa permasalahan yang ada terkait dengan konsep pembelajaran berbasis teknologi digital di era revolusi industri 4.0 diantaranya pertama, belum terbentuknya kurikulum yang memang sepenuhnya berorientasi pada teknologi sebagai pendukung proses pembelajaran. Kedua, belum terbentuknya kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang seragam seluruh Indonesia sebagai sebuah bentuk penyetaraan kemampuan lulusan calon pendidik sekolah dasar. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakmerataan pemahaman keilmuan yang ada pada lulusan khususnya calon pendidik di sekolah dasar. Sistem pendidikan konvensional yang selama ini dilaksanakan kurang fokus untuk menciptakan lulusan yang siap kerja dan siap pakai di dunia kerja (Kanuru & Priyaadharshini, 2020). Oleh karena itu perubahan kurikulum terencana yang berhasil adalah yang menghasilkan calon pendidik yang dapat mengimplementasikan kegiatan pengembangan praktik terbaik dalam pendidikan, peningkatan sistem pendidikan, dan calon pendidik yang mampu menampilkan hasil yang diharapkan saat kelulusan (Harris et al., 2003). Ketiga, calon pendidik sekolah dasar yang dibentuk oleh perguruan tinggi masih berpikiran bahwa revolusi industri 4.0 adalah *technology minded* padahal kaitannya dengan pendidikan begitu besar sekali. Pendidik harus mampu memberikan pembelajaran pada peserta didik dengan menyesuaikan perkembangan zaman serta mempunyai kemampuan teknologi informasi untuk

mengaplikasikannya di dalam sebuah proses pembelajaran. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia tentu mempengaruhi kebiasaan pembelajaran yang telah dilakukan. Kesiapan mahasiswa sebagai calon pendidik sekolah dasar dalam pembelajaran online bergantung pada beberapa aspek, seperti: kemampuan peralatan, keterampilan teknologi, motivasi, dan kegunaan yang dirasakan pada manfaat pembelajaran online (Widodo et al., 2020). Keempat, sikap menolak pengaruh teknologi yang mempengaruhi berbagai macam sendi kehidupan manusia.

Urgensi pembentukan kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang beorientasi pada teknologi sebagai sebuah upaya mencetak lulusan yang mampu bersaing dengan sesama bidang dan di luar bidang program studi. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan kurikulum yang beorientasi teknologi masih jarang dilakukan di Indonesia. Ini menjadi sebuah petunjuk bahwa mahasiswa sebagai calon pendidik sekolah dasar mempunyai kemampuan yang tidak seragam dalam hal kemampuan utamanya dalam hal pengetahuan. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang digunakan saat ini akan terus tidak mempunyai keseragaman minimal dalam kurikulum intinya, sehingga jika tidak secepatnya diselesaikan akan terjadi ketimpangan capaian pembelajaran di setiap prodi pencetak calon pendidik sekolah dasar.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini ditujukan untuk dapat mengetahui dan menggambarkan konsep makro kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang berorientasi pada revolusi industri 4.0. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi Pustaka. Metode ini digunakan dalam upaya untuk mengungkapkan fakta secara mendalam dan komprehensif terkait dengan kurikulum pendidikan kewarganegaraan untuk menyiapkan calon pendidik sekolah dasar yang berbasis digital. Alasan penggunaan metode studi Pustaka untuk memahami pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan untuk menyiapkan calon pendidik sekolah dasar. Kemudian untuk memperkuat kajian pengembangan ini, peneliti juga melakukan kajian melalui media observasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perubahan Kurikulum Pendidikan Tinggi**

Kurikulum dibuat berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dan kebaruan dari perkembangan yang ada di dunia. Kebutuhan untuk membentuk lulusan yang baik sesuai dengan zamannya tidak lain adalah untuk menyiapkan lulusan mampu beradaptasi dengan dunia yang terus berkembang. Kurikulum merupakan bagian dari proses pembelajaran akan terus mengalami pembaruan seiring dengan berkembangnya kehidupan masyarakat. Mahasiswa, dosen, kemajuan dalam penelitian, regulator, dan masyarakat turut mempengaruhi rancangan umum kurikulum di pendidikan tinggi (Anderson & Rogan, 2011). Pembaruan ini tentu juga berbicara tentang apa, dimana, kapan, siapa dan bagaimana sehingga kita dapat mempersiapkan bagaimana proses kurikulum itu harus terus diperbaharui. Kurikulum juga diperbaharui dengan mempertimbangkan kebutuhan mahasiswa calon pendidik sekolah dasar agar mereka siap dalam menyebarkan ilmu di sekolah sesuai dengan zaman yang sedang mereka alami. Jika ditinjau dari segi apa, maka hakikat kurikulum perlu mendapat perhatian dari sisi ini. Jika ditinjau dari segi dimana, maka letak dimana subjek yang akan dikenakan kurikulum tersebut harus dibahas. Jika ditinjau dari segi kapan, maka waktu pemberlakuan kurikulum itu yang perlu dibahas. Jika ditinjau dari segi bagaimana, maka yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana kurikulum itu disusun, bagaimana kurikulum dilaksanakan, dan bagaimana evaluasi dari penerapan kurikulum tersebut. Pengaruh kesemuanya itu mendorong lembaga pendidikan tinggi untuk memodifikasi konten, hasil belajar, pendekatan pendidikan, lingkungan pendidikan, metode penilaian dan lingkungan belajar yang terkait dengan kurikulum mereka (Dent et al., 2021). Kurikulum dapat terbentuk

dengan baik setidaknya mempertimbangkan tiga aspek diantaranya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Oliva & Gordon II, 2012). Perubahan kurikulum yang direncanakan adalah proses perkembangan yang secara terkelola menghasilkan bahan ajar dan penilaian, metode dan strategi yang dianggap baru oleh calon pelaksana (Marsh, 2009). Proses transisi kurikulum harus dipersiapkan dengan sangat matang sesuai dengan kebutuhan dan berorientasi ke masa depan. Jika tidak dipersiapkan dengan matang, pergeseran kurikulum digambarkan sebagai proses berbahaya yang mengakibatkan perbedaan antara kurikulum yang berlaku dan yang dijelaskan dalam dokumen yang disetujui dalam pengembangan kurikulum (Wilson et al., 2012). Oleh karena itu pergeseran kurikulum harus mempertimbangkan juga konsekuensi yang akan diterima.

Kurikulum sebagai suatu rencana untuk semua pengalaman yang dialami oleh mahasiswa di bawah perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah rencana, dalam bentuk tertulis dan dalam lingkup yang bervariasi, yang menggambarkan pengalaman-pengalaman belajar yang diinginkan (Oliva & Gordon II, 2012). Berkembangnya pengertian kurikulum yang dikemukakan oleh beberapa ahli kurikulum menyiratkan bahwa kurikulum itu memiliki tempat yang berbeda dalam setiap individu yang menggelutinya. Kurikulum adalah perlombaan dengan berbagai hambatan berupa mata pelajaran yang harus dilewati (Marcs & Willis, 2007). Kurikulum memiliki empat dimensi, yaitu dimensi ide, dimensi dokumen, dimensi proses, dan dimensi hasil (Hasan, 2007). Pemahaman kurikulum yang berlaku di perguruan tinggi diartikan sebagai sebaran berbagai matakuliah yang telah dipersiapkan dengan mempertimbangkan keluasan aspek yang dipelajari serta kecukupan materi yang diajarkan. Kurikulum di perguruan tinggi dikembangkan berdasarkan rambu-rambu yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi. Pada perguruan tinggi, kurikulum lebih identik dengan sebaran berbagai mata pelajaran atau matakuliah yang tersebar dan harus dilalui sebagai sebuah proses keberhasilan. Kurikulum merupakan rencana pembelajaran yang berisi berbagai jumlah materi dan bahan ajar yang harus dikuasai oleh pembelajar agar dapat menyelesaikan pendidikannya (Zais, 1976).

### **Kurikulum Pendidikan Tinggi di Negara Maju**

Kurikulum pendidikan tinggi yang disusun secara sistematis dan dijalankan di negara-negara maju mengupayakan bagaimana pendidikan yang diselenggarakan dapat memfasilitasi kebutuhan mahasiswanya agar dapat beradaptasi di masa depan dan mengantarkan mereka kepada cita-citanya sedekat mungkin. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh revolusi industri 4.0 sangat terasa mengubah dunia terutama pada digitalisasi berbagai aspek kehidupan manusia termasuk juga dalam bidang pendidikan. Praktik pembelajaran yang dilakukan pada masa lampau atau konvensional secara perlahan mulai ditinggalkan dan beralih menjadi pembelajaran yang lebih modern. Praktik pembelajaran tentu mengubah kurikulum sebagai sebuah bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Kurikulum pendidikan tinggi pada negara maju juga dipengaruhi oleh model pembelajaran sepanjang hayat yang ditekankan oleh bank dunia. Pembelajaran sepanjang hayat merupakan sebuah proses pembelajaran yang didesain untuk dapat mengembangkan kemampuan mahasiswa dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya nanti. Seperti pernyataan yang menyebutkan bahwa *Lifelong learning is defined as intentional learning to enhance the quality of life* (Yap & Tan, 2022).

Kesenjangan antara kurikulum dan dunia kerja masih menganga, kompetensi yang diberikan pada program studi belum sebanding dengan kemampuan minimal yang dibutuhkan oleh dunia kerja di Indonesia khususnya pada sektor pendidikan. Kedepannya diharapkan kompetensi keterampilan yang akan diperoleh mahasiswa dapat meningkat dan berubah secara dinamis agar dapat terbangun pondasi pembelajaran sepanjang hayat.

Tantangan pembelajaran sepanjang hayat artinya memperbaharui secara terus menerus kompetensi yang dibelajarkan kepada mahasiswa agar mampu mengikuti dan merespon kebutuhan secara cepat secara positif. Seperti yang diutarakan oleh Longworth & Davies *“the challenge of lifelong learning for universities is to view lifelong learning as an opportunity to expand their activities in all fields and to understand, and respond*

*positively to, the very different needs of their new customers*" (Longworth & Davies, 1996). Itu berarti bahwa pendidikan harus mampu terjangkau oleh semua lapisan masyarakat (Bergen, 2005), khususnya mahasiswa calon pendidik sekolah dasar dalam hal ini.

Pembelajaran sepanjang hayat harus mencakup hal-hal berikut (Knapper & Cropley, 2021):

1. Berlangsung seumur hidup untuk setiap individu;
2. Mengarah pada perolehan terstruktur, kelanjutan, peningkatan, atau penyelesaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap;
3. Menumbuhkan eksistensinya pada kemampuan dan motivasi belajar masyarakat;
4. Bergantung pada semua pengaruh pendidikan yang dapat diakses pada kontribusi termasuk formal, non-formal, dan informal.

Sebagai contoh, Inggris merupakan negara yang melakukan pengembangan kurikulum pendidikan tinggi dengan mempersonalisasi kegiatan pembelajaran. Seperti yang dikatakan oleh Mok *"In response to this fundamental shift, the UK government has started promoting a new learning approach which attaches weight to personalized learning, developing new strategies to help students learning to learn"* (MOK, 2010). Pernyataan tersebut menyatakan bahwa respon yang diberikan pemerintah Inggris terhadap perubahan globalisasi yang terjadi adalah dengan mempromosikan pola pembelajaran baru dengan cara mempersonalisasikan kegiatan pembelajaran. Kegiatan personalisasi proses pembelajaran adalah dengan mendorong mahasiswa untuk dapat belajar diluar kebiasaan belajar secara konvensional. Belajar yang dimaksud adalah dengan menggali secara mandiri terkait dengan kompleksitas yang terjadi akibat dari pengaruh globalisasi diantaranya pada bidang sosial, ekonomi, politik dan agama di seluruh dunia. Jika ditinjau dari praktik pembelajaran di kelas, keberlangsungan pembelajaran sepanjang hayat juga berhubungan dengan gaya belajar dan strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran di era globalisasi (Cabi & Yalcinalp, 2012). Gaya belajar yang dapat digunakan untuk pembelajaran sepanjang hayat dapat berupa pembelajaran accommodator, divergent, converger, dan assimilator (KILIÇ & Karadeniz, 2004).

Berbagai pilihan proses pembelajaran untuk mempersiapkan calon pendidik sekolah dasar dalam perkembangan teknologi dapat menghadapi globalisasi adalah seperti yang dikatakan oleh McFadden dkk. (Morey, 2000), bahwa kurikulum perlu dipersiapkan dengan mencakup: (1) promosi kesetaraan dan keadilan sosial; (2) peningkatan hubungan antarkelompok dan peningkatan kompetensi antarbudaya; (3) pengurangan prasangka, stereotip, dan diskriminasi; (4) perolehan dan pemberian pengetahuan tentang keragaman dan kesamaan manusia; (5) perolehan pengetahuan untuk kesadaran budaya mengenai budaya sendiri dan budaya lain; dan (6) pengembangan keterampilan dalam pemahaman kritis proses konstruksi pengetahuan. Senada dengan pandangan diatas, Kurikulum pada tingkat pendidikan tinggi yang akan dipersiapkan untuk calon pendidik sekolah dasar harus meningkatkan: (1) kemauan mahasiswa untuk berpikir secara global dan inklusif, (2) kesadaran akan implikasi lokal bagi komunitas internasional, (3) kesadaran diri, (4) kesadaran profesionalisme baik dalam perspektif global maupun lokal, dan (5) nilai-nilai kemampuan keragaman budaya dan budaya lain, yang merupakan indikator kualitas lulusan di lingkungan global (Leask, 1999).

Kurikulum yang mengikuti perkembangan globalisasi adalah kurikulum yang berorientasi pada konten multikulturalisme. Calon pendidik sekolah dasar didorong untuk lebih menghargai berbagai macam keberagaman dan permasalahan yang kompleks dari berbagai sudut kehidupan manusia sehingga akan mampu beradaptasi dengan berbagai mavam keadaan ketika sudah berada di masyarakat Amerika merupakan negara yang hamper lebih dari 100 perguruan tingginya sudah mengarahkan kurikulumnya pada pengetahuan terkait dengan multikulturalisme (MOK, 2010). Perihal multikulturalisme memiliki inti diantaranya:

1. peningkatan keahlian fakultas dalam pendidikan multikultural dan internasional;
2. meningkatkan basis pengetahuan tentang multikulturalisme dan internasionalisme melalui penelitian fakultas dan bentuk beasiswa lainnya;

3. menanamkan kurikulum dengan konten dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan belajar mengajar dalam konteks multikultural/internasional;
4. membentuk hubungan dan konsorsium dengan institusi pendidikan tinggi dan organisasi lain yang sesuai untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya mereka; dan
5. meningkatkan etika dan keragaman internasional mahasiswa (Morey, 2000)

Singapura merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem ini. Singapura mendorong perguruan tinggi untuk dapat bereksperimen dengan menghimbau kepada para pendidik khususnya dosen untuk dapat mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan permintaan pasar atau pemangku kepentingan. Begitupun dengan Australia, salah satu perguruan tinggi di Australia telah merombak 22 departemennya menjadi 8 bidang pembelajaran berorientasi pada kurikulum (Vidovich, 2004). Restrukturisasi ini berperan dalam perubahan arah pembelajaran dari kurikulum tradisional yang didominasi oleh sains dan matematika ke arah kurikulum yang lebih terintegrasi dan interdisipliner.

Akan tetapi, program kurikulum yang diarahkan pada pengetahuan multikulturalisme berbeda penerimaannya di setiap negara. Proses globalisasi yang terjadi saat ini telah mengubah kehidupan manusia termasuk didalamnya bidang pendidikan. Contoh dari penerimaan positif adalah Jepang dan beberapa negara di Asia yang mulai menginternasionalisasikan kurikulumnya dengan menggunakan bahasa Inggris, akan tetapi tidak demikian dengan negara-negara di Afrika. Negara-negara di Afrika lebih cenderung mengartikan penggunaan bahasa Inggris sebagai pengantar dalam pendidikan adalah sebuah re-kolonialisasi dan stratifikasi sosial (Gough, 2002).

### **Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar**

Mata pelajaran wajib yang menjadi inti dalam pendidikan dasar sampai dengan menengah salah satunya adalah mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Penegasan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan menjadi mata pelajaran wajib tertuang dalam pasal 37 UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Mata Pelajaran Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mencapai fungsi Pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa (Winataputra, 2009).

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi wahana pengembangan moral luhur yang dapat menjadi pembentuk moral baik para pendidik sekolah dasar dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan membentuk kematangan yang mengubah warganegara hipotetik menjadi warganegara yang siap untuk menjalani kehidupan nyata di masyarakat. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dilandasi oleh Pancasila sebagai pembentuk jatidiri masyarakat Indonesia dan UUD 1945 sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia. Fungsi pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar yang dilakukan secara ilmiah dan psikologis untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik agar terjadi internalisasi moral Pancasila dan pengetahuan kewarganegaraan untuk melandasi tujuan pendidikan nasional, yang diwujudkan dalam integritas pribadi dan perilaku sehari-hari (Somantri et al., 2001). Sementara fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan yang lain dikatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang baik (*to be good citizenship*), cerdas, terampil dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia yang merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 (Kariadi, 2016).

## KESIMPULAN

Proses digitalisasi juga menjadi cerminan kemajuan sebuah bangsa pada saat ini. Ukuran kemajuan pendidikan sebuah negara dapat terlihat dengan bagaimana modernisasi pendidikan dengan mengikuti perkembangan zaman. Pentingnya mempersiapkan calon pendidik sekolah dasar dengan kurikulum pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk moral peserta didik di kemudian hari sehingga dapat tercipta warganegara yang cerdas dan berperilaku baik. Sistem pendidikan yang terus berinovasi dan melakukan loncatan-loncatan besar dalam kegiatan pendidikan. Sudah saatnya sektor pendidikan dibenahi dan dilakukan modernisasi media-media pembelajarannya, menyiapkan calon pendidik yang berkualitas, dan menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tengah derasnya laju perkembangan teknologi. Hal ini bukan menggantikan peran pendidik dalam melakukan pembelajaran bagi peserta didik, akan tetapi caranya lah yang harus mulai menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Perkembangan teknologi informasi tidak begitu saja menghilangkan ajaran-ajaran tentang moral dan karakter, tetapi menyiapkan digitalisasi pendidikan juga sangat penting untuk dilaksanakan. Peran perguruan tinggi sangat besar dalam menumbuhkan kemampuan mahasiswa untuk dapat menguasai teknologi. Teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran di program studi PPKn tidak terlepas dari proses pembelajaran yang menggunakan teknologi digital baik itu model pembelajaran maupun penggunaan aplikasi pembelajaran dalam perkuliahan sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, T. R., & Rogan, J. M. (2011). Bridging the educational research-teaching practice gap: Curriculum development, Part 1: Components of the curriculum and influences on the process of curriculum design. *Biochemistry and Molecular Biology Education*, 39(1), 68–76.
- Bergen, C. (2005). *The European Higher Education Area - Achieving the Goals*. The European Higher Education Area - Achieving the Goals
- Cabi, E., & Yalcinalp, S. (2012). Lifelong learning considerations: relationship between learning styles and learning strategies in higher education. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 46, 4457–4462.
- Dent, J., Harden, R., & Hunt, D. (2021). *A Practical Guide for Medical Teachers, E-Book*. Elsevier health sciences.
- Gough, N. (2002). The long arm (s) of globalization: Transnational imaginaries in curriculum work. *Curriculum Visions*, 167–178.
- Harris, D. L., Henry, R. C., Bland, C. J., Starnaman, S. M., & Voytek, K. L. (2003). Lessons learned from implementing multidisciplinary health professions educational models in community settings. *Journal of Interprofessional Care*, 17(1), 7–20.
- Hasan, A. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kanuru, S. L., & Priyaadharshini, M. (2020). Lifelong Learning in higher education using Learning Analytics. *Procedia Computer Science*, 172, 848–852.
- Kariadi, D. (2016). Revitalisasi Nilai-Nilai Edukatif Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Masyarakat Berwawasan Global Berjiwa Nasionalis. *Jurnal PIPSI (Jurnal Pendidikan IPS Indonesia)*, 1(1), 14–23.
- Kewuel, H. K. (2016). Sistem pendidikan nasional dan kurikulum dalam perspektif filsafat antropologi. *Erudio Journal of Educational Innovation*, 2(2), 49–59.
- KILIÇ, E., & Karadeniz, Ş. (2004). Cinsiyet ve öğrenme stiline göre stratejisi ve başarıya etkisi. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 24(3).
- Knapper, C. K., & Cropley, A. J. (2021). *Lifelong Learning in Higher Education*. routledge.

- 5145 *Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan untuk Meyiapkan Pendidik pada Jenjang Sekolah Dasar – Yogi Nugraha, Sapriya, Endang Danial, Rahmat*  
DOI: <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.3054>
- Komalasari, K. (2012). The Living Values-Based Contextual Learning to Develop the Students' Character. *Journal of Social Sciences*, 8(2), 246–251.
- Leask, B. (1999). *Bridging the gap – internationalising university curricula. Paper Presented at NLC National Education Conference*. International Education: Bridging the Gap between Vision and Reality.
- Longworth, N., & Davies, W. K. (1996). *Lifelong Learning: New Vision, New Implications, New Roles for People, Organizations, Nations and Communities in the 21st Century*. ERIC.
- Marcus, C. J., & Willis, G. (2007). *Curriculum: alternative, approaches, ongoing issues, (fourth edition)*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Marsh, C. (2009). *Key concepts for understanding curriculum*. Routledge.
- MOK, K. H. J. (2010). Curriculum and globalization: Higher education. In *International Encyclopedia of Education* (pp. 403–410). Elsevier.
- Morey, A. I. (2000). Changing higher education curricula for a global and multicultural world. *Higher Education in Europe*, 25(1), 25–39.
- Oliva, P. F., & Gordon II, W. R. (2012). *Developing the curriculum*. Pearson Higher Ed.
- Rozalia, M. F. (2017). Hubungan intensitas pemanfaatan gadget dengan prestasi belajar siswa kelas V sekolah dasar. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Sekolah Dasar (JP2SD)*, 5(2), 722–731.
- Somantri, M. N., Indonesia, U. P., Supriadi, D., & Mulyana, R. (2001). *Menggagas pembaharuan pendidikan IPS: menandai 70 tahun usia Prof. Muhammad Numan Somantri, M. Sc., guru besar senior PPS dan FPIPS UPI*. Diterbitkan atas kerjasama Program Pascasarjana dan FPIPS UPI dengan PT ....
- UU No. 20 Tahun 2003, U. N. 20 T. 2003. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Vidovich, L. (2004). Towards internationalizing the curriculum in a context of globalization: Comparing policy processes in two settings. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 34(4), 443–461.
- Widodo, S. F. A., Wibowo, Y. E., & Wagiran, W. (2020). Online learning readiness during the Covid-19 pandemic. *Journal of Physics: Conference Series*, 1700(1), 12033.
- Wilson, E. A., Rudy, D., Elam, C., Pfeifle, A., & Straus, R. (2012). Preventing curriculum drift: Sustaining change and building upon innovation. *Annals of Behavioral Science and Medical Education*, 18(2), 23–26.
- Winataputra, U. S. (2009). Jati Diri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Demokrasi (Desertasi). *Pasca Sarjana UPI*, 131.
- Yap, J. S., & Tan, J. (2022). Lifelong learning competencies among chemical engineering students at Monash University Malaysia during the COVID-19 pandemic. *Education for Chemical Engineers*, 38, 60–69.
- Zais, R. S. (1976). *Curriculum: Principles and foundations*. Ty Crowell Company.